

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik lembaga akuntansi publik, seperti akuntansi sektor publik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejak digulirkannya otonomi daerah di Indonesia sistem pemerintahan terutama di bidang keuangan daerah menjadi pusat perhatian semua kalangan, apalagi tuntutan adanya keterbukaan dalam pelaporan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah harus memenuhi kaidah pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparansi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Akuntansi sektor publik menjadi perhatian banyak kalangan di masa sekarang dan tentunya mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring tuntutan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Akuntansi bisa dikatakan sebagai sebuah proses dalam hal pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau entitas yang nantinya akan digunakan sebagai informasi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan (Halim, 2012 dalam Belinda, 2021).

Selanjutnya akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Semakin banyak perhatian sekarang diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Badan akreditasi dituntut oleh masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk berfungsinya tahapan siklus akuntansi Sektor Publik. Siklus mana yang meliputi semua urutan cara mulai dari sebuah persiapan, perkiraan, penerapan anggaran, penyediaan barang dan jasa, pelaporan, audit dan akuntabilitas publik. Standar akuntansi yang dipakai di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (Belinda, 2021).

Sektor publik merupakan sektor-sektor yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaksanaan utama dari tujuan organisasinya yaitu tidak mencari keuntungan keuangan. Jadi organisasi tersebut umumnya dimiliki secara kolektif secara publik dan kepemilikan atas sumber dayanya tidak dicerminkan dalam bentuk saham yang dapat diperjual belikan. Mekanisme pengambilan keputusan publik atas kebijakan dan operasi organisasi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (Bastian, 2010). Organisasi sektor publik adalah organisasi yang ruang geraknya berkenaan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan Negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi Negara (Mahmudi, 2016 dalam Amelia, 2022).

2.1.1.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Muidro,2013 dalam Nurlinda,2022) organisasi sektor publik bekerja dalam lingkungan yang sangat beragam, termasuk faktor ekonomi, politik, budaya dan demografi. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

1. Faktor ekonomi, meliputi antara lain:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Tingkat Inflasi
 - c. Tenaga kerja
 - d. NilaiTukar Mata Uang
 - e. Cadangan Devisa
 - f. Infrastruktur
 - g. Struktur Produksi
 - h. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita
 - i. Teknologi
2. Faktor Politik, Meliputi antara lain:
 - a. Hubungan Masyarakat negara
 - b. Legitimasi Pemerintah
 - c. Ideologi Negara

- d. Elit Politik dan Masa
- e. Jaringan Internasional
- f. Kelembagaan

3.Faktor Kultural, Meliputi antara lain :

- a. Keragaman Suku , Ras,agama, bahaasa dan budaya
- b. Sistem nilai di masyarakat
- c. Historis
- d. Sosiologi masyarakat
- e. Karakteristik Masyarakat
- f. Tingkat Pendidikan

4.Faktor Demografi, Meliputi antara lain :

- a. Pertumbuhan Penduduk
- b. Usia Penduduk
- c. Migrasi
- d. Tingkat Kesehatan

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Majid (2019) memberikan informasi kepada mereka tentang pengendalian manajemen dan pertanggung jawaban data akuntansi bermanfaat untuk:

1. Keputusan khususnya mengenai pembagian sumber daya
2. Memilih program dan melakukan evaluasi investasi
3. Menentukan Metrik untuk Mengukur Kinerja Sektor publik

2.2. Akuntabilitas

istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. (Tetlock,dalam Diani dan Ria ,2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Dalam sektor publik, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Hidayat,2011).

Akuntabilitas pada penelitian Elisha dan Icuk (2010) menggunakan tiga indikator yaitu meliputi: Motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial. Tetapi pada penelitian ini akan menggunakan 2 indikator yaitu motivasi dan kewajiban sosial.

2.2.1. Prinsip Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik , Menurut Djalil (2014) ciri Pemerintah yang akuntabel adalah

1. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat

2. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya kepada publik
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta
4. Sebagai sarana , bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah .

2.2.2. Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat Chandler dan plano membedakan ada lima jenis akuntabilitas adalah (Raba, 2006:35)

1. Akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana publik
2. Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum
3. Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program
4. Akuntabilitas Proses Tanggung Jawab untuk melaksanakan prosedur dan
5. Akuntabilitas Outcome Tanggungjawab atas hasil

Ada empat jenis akuntabilitas, yaitu (Raba, 2006: 36)

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
2. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik.

Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program, yaitu: akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.2.3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Rasul (2002:11) dalam Rahmatiah (2017) dimensi akuntabilitas ada 5 (lima), yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

2.2.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas di ambil dari dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain menurut Ellwood,(1993) dalam mardiasmo,(2018:28) adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas proses

Pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Berkaitan dengan pertimbangan apakahtujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah ,baik pusat maupun daerah ,atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Pemerintah terhadap masyarakat luas.

2.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (PP Nomor 8,2006).sedangkan menurut Nordiawan *et a.*, (2010)kinerja pemerintah tidak bisa dilihat dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome , manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat . singkatnya kinerja pemerintah adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja di suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas sumber daya baik secara finansial harus dapat diukur dan pengukuran tersebut semata mata tidak hanya tergantung pada *input* (masukan) dari kegiatan /program tersebut tetapi pengukuran tersebut lebih menekankan pada *output* (keluaran)yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan (Danayanti dan Hermanto,2018).

2.3.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut (sedermayanti 2017: 286) indikator indikator kinerja pemerintah daerahdiantaranya yaitu:

1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.

2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan
3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas.
4. Kemampuan bekerja sama
5. Kemandirian

2.4. Hubungan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dapat dilihat dalam dua hal yaitu: salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan program/kegiatan dan anggaran. Implementasi akuntabilitas diyakini akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah.

Implikasi akuntabilitas dan teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjalankan sistem pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan yang akuntabel (Rizal & Hermanto, 2019) Berdasarkan penelitian telah dilakukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Semakin baik bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, maka

semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya (Novianti, Kusumah, & Vabiani (2019).

2.5. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Jurnal Dan Volume,Nomor,Tahun	Variabel Yang Di Teliti,Alat Analisis,Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Evita & Handayani (2024)	Pengaruh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah vol.6.No.1,februari 2024 hal 29-43	-Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah -Variabel Independent 1. Akuntabilitas 2. Sisem Pengendalian Internal Hasil penelitian : Akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah	Sama sama meneliti akuntabiklitas dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah	Lokasi penelitian
2.	Melasari et.al (2023)	Pengaruh pengendalian internal ,akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah pada opd Kabupaten Indragilir Hilir	Variabel Dependen Kinerja pemerintah pada opd indragilir hilir Variabel Independen	Sama sama meneliti pengendali an internal ,	Terletak pada variabel dan objek peneliti

		Vol .11.No 2,juli – desember 2022	<p>1. Pengendalian Internal, Akuntabilitas</p> <p>2. Transparansi</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Pengendalian intetrnal , akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada opd kabupaten indragilir hilir</p>	akuntabilitas	
3.	Syadika (2021)	<p>Pengendalian internal ,akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah</p> <p>(studi kasus badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten bogor).</p> <p>Vol.9.No 3 (2022)</p>	<p>Variabel Dependen</p> <p>Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Independent</p> <p>1. Pengendalian Internal, Akuntabilitas</p> <p>2. Transparansi</p> <p>Hasil penelitian :</p> <p>Pengendalian internal, akuntabilitas da transparansi berpengaruh positif terhadap</p>	Sama sama meneliti akuntabilitas dan pengendalian internal	Perbedaan terletak pada variabel dan lokasi penelitian

			kinerja pemerintah daerah pada BPKAD kabupaten bogor		
4.	Annisa Zahra (2023)	Pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi Sumatera utara Vol.6. No 2 (2023) hal 236 – 247	Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah Variabel Independen 1. Transparansi 2. Akuntabilitas Hasil penelitian : Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.	Sama sama meneliti akuntabilitas	Perbedaan terletak pada variabel dan lokasi penelitian
5.	Dewi aprianti (2020)	Pengaruh kejelasan anggaran pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan wilayah Jakarta selatan. Vol.9.No 2, juli 2022	Variabel dependen Kinerja instansi pemerintah Variabel independent 1. kejelasan anggaran pengendalian internal 2. sistem pelaporan hasil penelitian kejelasan anggaran pengendalian	Sama sama meneliti pengendalian internal dan akuntabilitas	Terletak pada variabel dan objek

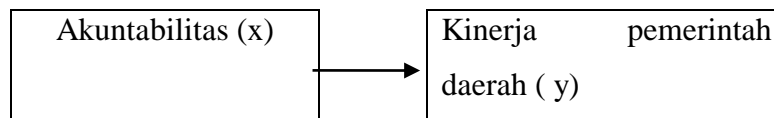
			internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah di kecamatan wilayah Jakarta selatan		
6.	Mattoasi & sitna jainuddin (2024)	Pengaruh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap keuangan pemerintah daerah (studi kasus di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kota tidore kepulauan Vol .3 No 2 (2024) hal 101 - 112	Variabel Dependen Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independent 1. Akuntabilitas 2. Sistem Pengendalian Internal Hasil penelitian : Akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keuangan pemerintah daerah (studi kasus di badan pengelolaan keuangan dan	Sama sama meneliti akuntabilitas dan sistem pengendalian internal	Terletak pada variabel dan objek penelitian

			asset daerah kota tidore kepulauan		
7.	Sigit prabawa (2020)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap good governance (studi empiris di kabupaten minahasa Vol. 15.No 2 (2020)	<p>Hasil penelitian : Variabel Dependen</p> <p>Good Governance</p> <p>Variabel Independent</p> <p>1.Sistem Pengendalian Intern</p> <p>2.Akuntabilitas</p> <p>sistem pengendalian interndan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap good governance (studi empiris dikabupaten minahasa</p>	Sama sama meneliti sistem pengendalian intern dan akuntabilitas	Terletak pada variabel dan objek penelitian

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Polancik (2009) kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Hal ini menempatkan untuk kepentingan penelitian, dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antar variabel independen dalam hal ini adalah akuntabilitas (X) dan variabel dependennya yaitu kinerja pemerintah daerah (y).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan adanya dugaan atau hubungan antara variabel X dan Y yang akan diuji kebenarannya melalui data yang dikumpulkan dalam penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan diatas pernyataan Hipotesis dari penelitian ini Diduga ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah di kecamatan Peninjauan